



**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT,
BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

EDWARD LUBIS

1425310339

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ASNAWI
NPM 1715210137
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : STRATA 1 (S1)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI DISTRIBUSI PENDAPATAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA
MEDAN TAHUN 2011-2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Bakhtiar Efendi, SE., M.Si)

MEDAN, JULI 2021
DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

PEMBIMBING I

Rusiadi SE., M.Si CIQar CIQnR)

PEMBIMBING II

(Dr. Bakhtiar Efendi, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

NAMA : EDWARD LUBIS
NPM : 1425310339
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR,
BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD
PAPUA

KETUA

dn

Dr. Elfitra Desy Surya, SE, MM, CIQnR

ANGGOTA - II

Rindi Andika, SE, MM

**MEDAN, MEI 2021
ANGGOTA - I**

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE, MM

ANGGOTA - III

Miftah El Fikri, SE, M.Si

ANGGOTA - IV

Dewi Nurmasari Pane, SE, MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EDWARD LUBIS
NPM : 1425310339
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS /MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD
SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD
RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Mei 2021

EDWARD LUBIS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edward Lubis
Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 09 Juli 1985
NPM : 1425310339
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Manajemen
Alamat : Jl. Sipirok No 1b Pematangsiantar

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

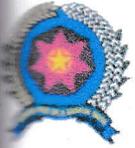
Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2021

Yang membuat pernyataan



EDWARD LUBIS



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: EDWARD LUBIS
Tempat/Tgl. Lahir	: PEMATANG SIANTAR / 09 Juli 1985
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1425310339
Program Studi	: Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan
Nilai Kredit yang telah dicapai	: 141 SKS, IPK 3.23
Nomor Hp	: 081375914191

Sehingga ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 26 Februari 2020
 Pemohon,

 (Edward Lubis)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 26/02/2020

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE, MM)

Tanggal : 26/2/20

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Manajemen
 (Nurafrina Siregar, SE., M.St.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
 (Rindi Andika, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EDWARD LUBIS
NIM : 1425310339
Program Studi : Manajemen
Sesingkat : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Januari 2021	ACC. Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 12 Januari 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EDWARD LUBIS
 NIM : 1425310339
 Program Studi : Manajemen
 Tingkat Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
 Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status Keterangan
Januari 2021	ACC. Sidang Meja Hijau	Disetujui
21 Maret 2021	ACC. Meja Hijau Dengan Catatan sebagai berikut: 1. Sinkronkan Tujuan Penelitian dengan Simpulan dan Saran 2. Pastikan Saran terbaik berasal dari indikator-indikator terlemah pada masing-masing Variabel 3. Pastikan semua lampiran dokumen pendukung sudah ada semua	Disetujui

Medan, 21 Maret 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-36106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : EDWARD LUBIS
NIM : 1425310339
Jurusan Studi : Manajemen
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Rindi Andika, SE., MM
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

Pembahasan Materi

Status Keterangan

Perbaiki 1. Lampirkan lembar pengesahan Ujian 2. Lampirkan lembar Persetujuan Ujian 3. Kata Abstrak Di sesuaikan dengan Format. 4. Kata Pengantar Di lengkapi 5. Daftar isi sesuaikan dengan sub Judul dan sebagaimana 6. Lampiran administrasi lainnya di lampirkan

Revisi

Acc Sidang Meja Hijau

Disetujui

Medan, 21 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Rindi Andika, SE., MM



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EDWARD LUBIS
NIM : 1425310339
Program Studi : Manajemen
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULLUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPU)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
11 Januari 2021	ACC. Sidang Meja Hijau	Disetujui	
12 Maret 2021	ACC. Meja Hijau Dengan Catatan sebagai berikut: 1. Sinkronkan Tujuan Penelitian dengan Simpulan dan Saran 2. Pastikan Saran terbaik berasal dari indikator-indikator terlemah pada masing-masing Variabel 3. Pastikan semua lampiran dokumen pendukung sudah ada semua	Disetujui	
06 Juli 2021	ACC. Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 08 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------

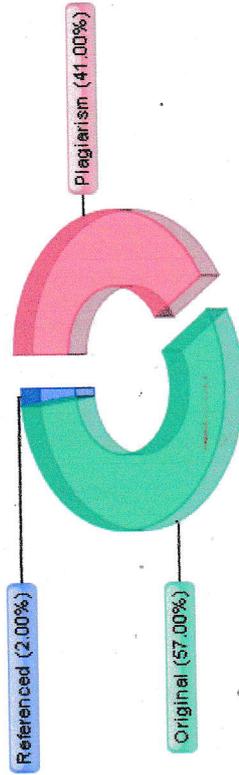
Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 58

- 17% **2363** 1. <https://yellowpages.co.id/bisnis/bank-pembangunan-daerah-sulawesi-selatan-pt-29>
- 14% **2015** 2. <https://pt.scribd.com/doc/305802350/Analisis-Laporan-Keuangan-pada-PT-Bank-Pembangunan-Deerah-Sulawesi-Selatan>

Tujuan : Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 April 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWARD LUBIS
 Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANG SIANTAR / 09 JULI 1985
 Nama Orang Tua : RIZAL ALAM LUBIS
 N. P. M : 1425310339
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Manajemen
 No. HP : 081375914191
 Alamat : JALAN SIPIROK NOMOR 1 B KOTA PEMATANGSIANTAR

Adapun bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :



Hormat saya



EDWARD LUBIS
 1425310339

23/7/21

Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Website :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

siswa.pancabudi.ac.id/ta/mohonmejahijau



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3346/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: EDWARD LUBIS

: 1425310339

Semester : Akhir

IS : SOSIAL SAINS

Prodi : Manajemen

nya terhitung sejak tanggal 07 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Desember 2020

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : EDWARD LUBIS
NIM : 1425310339
Tempat/Tgl. : PEMATANG SIANTAR / 09 JULI 1985
Alamat : JALAN SIPIROK NOMOR 1 B KOTA PEMATANGSIANTAR
No. HP : 081375914191
Nama Orang : RIZAL ALAM LUBIS/IDANI NASUTION
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program : Manajemen
Judul : ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT, BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA)

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Jika ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

14 April 2021
Edward Lubis
1425310339
1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
3F5AJX008558779
METERAN TEMPEL
EDWARD LUBIS
1425310339

ACC Amanah Prose
A/PSII
Pud Andika 5/20
/12



**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH (STUDI KASUS BPD SULSELBAR, BPD SULUT,
BPD SUMUT, BPD RIAU, BPD DKI DAN BPD PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

EDWARD LUBIS

1425310339

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana tingkat likuiditas pada bank pembangunan daerah (studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua) dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BPD Sulselbar yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 80,21%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 107,06%. Bank BPD Sulut yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 90,10%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 74,43%. Bank BPD Sumut yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 82,11%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 76,64%. Bank BPD Riau yang dinyatakan tingkat kesehatannya tidak sehat tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 127,69%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 75,81%. Bank BPD DKI yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,47%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 72,31%. Bank BPD Papua yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 84,78%, sedangkan bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 58,47%.

Kata Kunci : Likuiditas Bank Pembangunan Daerah

ABSTRACT

The research analysis aims to determine whether the level of liquidity at regional development banks (case study BPD Sulsebar, BPD North Sulawesi, BPD North Sumatra, BPD Riau, BPD DKI and BPD Papua) in the period 2016 to 2019. This research uses descriptive analysis. The results showed that the BPD Sulsebar Bank which was declared the highest level of health was in 2016 at 80.21%, while the lowest bank was declared unhealthy, namely in 2019 at 107.06%. Bank BPD North Sulawesi, which was declared the highest level of health, was in 2019 at 90.10%, while the lowest bank was declared healthy, namely in 2017 at 74.43%. Bank BPD North Sumatra which was declared the highest level of health, namely in 2016 amounting to 82.11%, while the bank was declared the lowest healthy, namely in 2018 amounting to 76.64%. Bank BPD Riau, which was declared the highest level of unhealthy, was in 2016 at 127.69%, while the lowest bank was declared unhealthy, namely in 2017 at 75.81%. Bank BPD DKI, which was declared the highest level of health, was in 2019 at 87.47%, while the lowest bank was declared unhealthy, namely in 2018 at 72.31%. Bank BPD Papua which was declared the highest level of health, namely in 2016 amounted to 84.78%, while the lowest bank was declared unhealthy, namely in 2018 amounting to 58.47%.

Keywords : Regional Development Bank Liquidity

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau dan BPD Papua)”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehkarena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. Bapak Ramadhan Harahap, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
4. Bapak Dr. Muhammad Toyib Daulay, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Rindi Andika, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Kepada seluruh keluarga penulis khususnya orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta mendukung saya baik secara materil maupun non materil;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Medan, Mei 2021

Penulis

EDWARD LUBIS
NPM : 1425310339

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Bank.....	9
2. Likuiditas.....	22
3. Laporan Keuangan.....	26
B. Penelitian Sebelumnya.....	36
C. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Definisi Operasional Variabel.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran tentang Perusahaan.....	45
2. Hasil Analisis Data <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR).....	62
B. Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Perekonomian suatu Negara ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat (Kuncoro, 2012:539) dalam Darma (2018). Setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya selalu memerlukan modal kerja untuk menjaga kelancaran usahanya, modal kerja ini diperlukan untuk membeli bahan baku, membayar gaji dan upah, biaya produksi, biaya administrasi dan umum. Oleh sebab itu, dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan diharapkan dapat kembali dalam waktu relatif singkat dan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Pada perusahaan perbankan, dana yang terbesar digunakan adalah untuk penyaluran kredit yang diberikan kepada debitur. Periode perputaran kredit antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Semakin cepat bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang diberikan, berarti bank dapat segera memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga disamping tetap menjaga ketersediaan dana. Selain itu, kebutuhan dana oleh bank tetap dapat dipertahankan dan bank akan semakin likuid yaitu mampu untuk membayar kewajiban- kewajiban jatuh tempo.

Likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat (Taswan, 2016) dalam Darma (2018). Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitmen loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga

lainnya. Sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana. Dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan.

Bank harus dapat menemukan formulasi tepat dalam menjaga likuiditas sehingga dapat memelihara alat likuiditasnya yang sesuai dengan yang diperlukannya dan bank juga dapat menghindari biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuiditas yang berlebihan.

Dana yang berlebihan dan menganggur akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank berupa bunga yang dibayarkan lebih besar dari penerimaan yang didapat dari pendapatan bunga kredit yang diberikan kepada debitur selain denda yang dikenakan oleh pihak regulator. Selain itu, banyaknya dana berlebih dan menganggur pada bank memperlihatkan pengelolaan likuiditas bank yang kurang baik. Contoh yang lainnya pada saat suatu perusahaan akan menarik dana yang dibutuhkan, haruslah diketahui lebih dahulu untuk berapa lama dana itu akan dipergunakan didalam perusahaan. Penarikan dana yang dibutuhkan didasarkan kepada ketentuan bahwa dana yang dibutuhkan itu hendaknya ditarik untuk jangka waktu yang sesuai dengan penggunaan dana tersebut didalam perusahaan. Sebab dari itu perlu adanya pemenuhan kebutuhan dana dalam setiap perusahaan.

Pemenuhan kebutuhan dana sendiri dapat dibedakan antara cara pemenuhan kebutuhan dana sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing aktiva yang akan dibiayai dan cara pemenuhan kebutuhan dana secara keseluruhan dengan memandang kebutuhan sebagai satu kesatuan atau satu kelompok. Adapun

setiap dana yang digunakan dalam suatu perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan (Veitzhal, 2017) dalam Darma (2018).

Pendapatan pada sisi passiva harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah yang ada di bank, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana, bank perlu mengatur dananya secara terencana dan tepat karena kelebihan maupun kekurangan dana, kedua-duanya tidak menguntungkan bagi bank. Keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas dapat diketahui pada:

1. Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana diwaktu yang akan datang;
2. Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan dana dengan menukarkan harta lancarnya;
3. Kemampuan memperoleh dana secara mudah dengan biaya yang murah;
4. Kemampuan pendapatan pergerakan cash in dan cash out dana.
5. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apapun kedalam cash.

Berdasarkan surat edaran kepada semua bank umum di Indonesia oleh Bank Indonesia Jakarta 16 Juli 2009 No. No.11/ 16 /DPNP mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dan perlunya pengelolaan Risiko Likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.

“BI mengeluarkan peraturan standar LDR perbankan pada kisaran 78%-92% yang berlaku mulai Agustus 2015. Jika LDR di bawah 78%, BI akan mengenakan denda 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank tersebut untuk tiap 1% kekurangan LDR. Jika LDR bank di atas 92%, bank harus menambah setoran giro wajib minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari jumlah simpanan nasabah di bank tersebut untuk tiap kelebihan LDR 1%. Jika dilihat dari tabel ada beberapa Bank yang LDRnya masih dibawah 78% tetapi ada juga yang lebih dari 92%.

Tabel 1.1 Sumber Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD SULSEL- BAR	Giro	3.758.380	3.157.744	2.709.629	3.746.457	4.284.826
	Tabungan	2.421.833	2.645.858	3.586.567	4.587.307	4.636.149
	Deposito	4.835.350	5.362.694	6.352.647	7.300.209	7.264.841
	Jumlah DP III	11.015.563	11.166.296	12.648.843	15.633.973	16.185.816
	Kredit	11.369.745	13.352.644	15.230.189	17.573.397	18.635.757
	LDR (%)	103,22	119,58	120,41	112,41	115,14
BPD SULUT	Giro	1.562.990	1.736.058	1.618.196	1.255.482	1.428.990
	Tabungan	1.452.282	1.826.231	1.856.189	2.062.528	2.138.066
	Deposito	4.926.116	7.767.074	7.317.668	8.655.847	10.095.311
	Jumlah DP III	7.941.388	11.329.363	10.792.053	11.973.857	13.662.367
	Kredit	8.882.680	10.915.412	11.100.329	12.163.917	12.470.378
	LDR (%)	111,85	96,35	102,86	101,59	91,28
BPD SUMUT	Giro	6.172.707	5.680.952	4.839.885	4.864.212	4.427.331
	Tabungan	7.152.979	8.140.349	9.053.017	9.703.869	10.355.318
	Deposito	5.873.354	7.368.710	6.247.856	8.507.687	12.165.228
	Jumlah DP III	19.199.040	21.190.011	20.140.758	23.075.768	26.947.877
	Kredit	17.576.935	18.465.683	19.373.312	21.568.621	21.662.386
	LDR (%)	91,55	87,14	96,19	93,47	80,39
BPD RIAU	Giro	2.479.210	7.059.537	2.883.255	3.704.032	3.453.032
	Tabungan	4.050.095	3.907.701	5.518.607	6.052.374	6.052.385
	Deposito	4.509.294	5.290.408	8.562.392	10.180.645	12.337.227
	Jumlah DP III	11.038.599	16.257.646	16.964.254	19.937.051	22.142.644
	Kredit	14.095.301	12.325.548	16.632.633	17.884.069	18.960.949
	LDR (%)	127,69	75,81	98,04	89,70	85,63
BPD DKI	Giro	9.079.577	13.213.374	10.932.203	7.611.715	11.177.236
	Tabungan	7.846.386	8.356.438	11.231.508	10.545.216	11.077.195
	Deposito	11.526.403	16.765.648	15.129.534	19.144.736	26.668.732
	Jumlah DP III	28.452.366	38.335.460	37.293.245	37.301.667	48.923.163
	Kredit	21.050.310	23.067.266	29.302.039	31.370.920	29.677.981
	LDR (%)	73,98	60,17	78,57	84,10	60,66
BPD PAPUA	Giro	7.033.795	7.641.693	8.151.733	11.086.817	9.241.367
	Tabungan	6.287.064	6.572.270	7.361.170	8.804.223	8.111.789
	Deposito	3.157.804	2.349.842	2.416.906	2.953.943	3.000.604
	Jumlah DP III	16.478.663	16.563.805	17.929.809	22.844.983	20.353.760
	Kredit	14.209.840	13.270.908	14.147.217	16.060.678	17.034.086
	LDR (%)	86,23	80,12	78,90	70,30	83,69

Sumber : website masing – masing BPD

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat LDR Bank Sulselbar periode tahun 2016 sampai dengan 2020 berada diluar standar yang ditetapkan oleh regulator. LDR Bank Sulut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016 sampai dengan 2019. LDR Bank Sumut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2018 dan 2019. LDR Bank Riau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2018. LDR Bank DKI tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2020. LDR Bank Papua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **Analisis Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rasio LDR Bank Sulselbar periode tahun 2016 sampai dengan 2020 berada diluar standar yang ditetapkan oleh regulator.
- b. Rasio LDR Bank Sulut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

- c. Rasio LDR Bank Sumut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2018 dan 2019.
- d. Rasio LDR Bank Riau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2018.
- e. Rasio LDR Bank DKI tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2020.
- f. Rasio LDR Bank Papua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2019.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada analisis tingkat likuiditas yang diukur dengan menggunakan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada bank pembangunan daerah (studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua) dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas penulis yaitu :

1. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank Sulselbar periode tahun 2016 sampai dengan 2020 berada diluar standar yang ditetapkan oleh regulator ?

2. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank Sulut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016 sampai dengan 2019 ?
3. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank Sumut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2018 dan 2019 ?
4. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank Riau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2018 ?
5. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank DKI tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2016, 2017 dan 2020 ?
6. Apa yang menyebabkan Rasio LDR Bank Papua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator pada tahun 2019 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingkat likuiditas pada bank pembangunan daerah (studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua) dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti sekaligus sebagai suatu penerapan teori-teori manajemen yang telah dipelajari selama ini dalam aktivitas perusahaan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain dalam penelitiannya yang terkait dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ramadaniar (2013), Universitas Brawijaya Malang, dengan judul analisis rasio keuangan perbankan untuk menilai kinerja keuangan bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang *Listing* Di BEI Untuk Periode Tahun 2009 – 2011). Sedangkan penelitian ini berjudul: analisis tingkat likuiditas pada bank pembangunan daerah (studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua).

Perbedaan penelitian terletak pada:

- 1. Variabel Penelitian :** penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yaitu likuiditas.
- 2. Jumlah Data (n) :** penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2009 – 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan data pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

3. **Waktu Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini tahun 2021.
4. **Lokasi Penelitian** : lokasi penelitian terdahulu di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang *Listing* Di BEI, sedangkan penelitian ini dilakukan di BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Warsono, 2013).

Fahmi (2011), dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan” menjelaskan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profitabilitas dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 31 dijelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak – pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dalam Wikipedia disebutkan, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, dan menerbitkan promes atau banknote.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank bisa dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, terutama di era modern seperti sekarang ini. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Boleh dikatakan hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula menjadi tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Menurut Ismail (2015), “Semakin maju suatu negara, semakin besar pula peranan perbankan dalam membangun negara tersebut. Masyarakat modern saat ini sangat membutuhkan peran pentingnya perbankan, mulai dari menyimpan/ meminjam ataupun transaksi – transaksi keuangan yang disediakan oleh bank. Dengan demikian keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat”.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir (2011) berpendapat bahwa: “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiyai perusahaan-perusahaan, dan lain – lain”.

Kuncoro (2000) berpendapat bahwa: “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Dari beberapa definisi bank di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediator bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkan/meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa: “Bank Umum adalah bank yang menjelaskan kegiatan – kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Lubis (2014) berpendapat bahwa “Bank Umum merupakan salah satu institusi keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian setiap negara. Berbagai jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Bank Umum sangat menentukan kelancaran produksi, distribusi, dan konsumsi di tengah masyarakat sehingga bank dianggap sebagai *agent of development*, *agent of trust*, dan juga *agent of services*.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, “aktivitas-aktivitas Bank Umum antara lain adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat berharga tersebut antara lain :
 - a) Surat-surat wesel
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e) Obligasi
 - f) Surat dang berjangka waktu sampai 1 tahun
 - g) Instrument surat berharga lain yang berjangka sampai 1 tahun

- 5) Memindahkan uang (transfer) untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada atau meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundangan yang berlaku”.

b. Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2011:61) “Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya”, dapat dibedakan menjadi 3 sumber yaitu:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari:

a) Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b) Cadangan-cadangan bank

Yaitu cadangan-cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini digunakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c) Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana ini diperoleh dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

3) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

c. Fungsi Bank

Menurut Ismail (2015), “Bank memiliki fungsi yang krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu keberadaan asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah kebangkrutan bank yang akan berdampak pada perekonomian suatu Negara”.

Menurut Ismail (2015), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan”.

Dendawijaya (2014), “menjelaskan fungsi bank sebagai berikut:

1) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, begitu pula sebaliknya pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya saat jatuh tempo.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, dimana kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya kehadiran uang.

3) *Agent of service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberi jaminan bank, dan penyelesaian tagihan”.

Menurut Ayuningrum (2011), “Dari fungsi yang ada dapat dikatakan bahwa dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan, baik kepercayaan bank kepada masyarakat maupun sebaliknya. Oleh karena itu untuk tetap menjaga kepercayaan tersebut kesehatan bank perlu diawasi dan dijaga”.

d. Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Puspitasari (2009), “Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan”.

Menurut Hariyani (2016), “kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Menurut Kasmir (2016), “kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan”.

Menurut Abdullah (2015), “kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank”.

Selanjutnya Dendawijaya (2014), “mendefinisikan kinerja keuangan bank sebagai gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu dimana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan di masa depan”. Menurut Abdullah (2015), “tujuan dari penilaian kinerja keuangan bank yaitu”;

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

e. Rasio Keuangan Bank

Menurut Hariyani (2014), “Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis kinerja keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dari rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Selain itu, dengan analisis rasio keuangan akan dapat diketahui jika suatu perusahaan bank melakukan penyimpangan”.

f. Laporan Keuangan sebagai Sumber Informasi Rasio Keuangan

Menurut Irawan (2018:1), “laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”.

Menurut Kasmir (2016), “rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

Menurut Hariyani (2016), “Rasio Keuangan atau *Financial Ratio* merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan”. Menurut Sawir (2015), “Rasio keuangan atau yang dikenal dengan istilah *financial ratio* ialah sebagai alat analisis untuk membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dan juga untuk melihat atau mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen perusahaan tersebut dalam satu periode tertentu”.

Menurut Sawir (2015), “Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut”.

Menurut Soemarso (2013), “laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan”. Menurut Kasmir (2016) mendefinisikan laporan keuangan adalah “informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau, dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan datang”.

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikutip oleh Sawir (2015), “adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan sehingga member manfaat bagi sejumlah besar pemakai (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian di masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang akan dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Menurut Kasmir (2016) “secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank.
- 2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.

- 3) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh bank dan sumber-sumber pendapatan bank.
- 5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- 6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
- 7) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan”.

Dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan maka akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

g. Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2011:64), “Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank”, terdiri dari 3 jenis yaitu:

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang

disebut sebagai rekening koran. Biasanya giro dibedakan atas dua kategori pemilik yaitu, rekening perorangan dan rekening atas nama badan. Motivasi simpanan uang dalam bentuk giro adalah untuk memenuhi keperluan usaha sehari-hari, sehingga pengendapan dana pada umumnya tidak lama dan sulit diperkirakan.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam melakukan penarikan dana, nasabah tidak perlu memperhatikan jatuh tempo pencairan seperti pada deposito. Motif masyarakat dalam menabung pada produk ini adalah sebagai penanaman dana dan berjaga-jaga atau untuk menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu setelah dananya mencukupi akan ditarik kembali.

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Deposito merupakan sumber dana pinjaman terbesar bagi kebanyakan bank. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari produk ini, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dan melakukan.

2. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat (Mudrajat) dalam Darma (2008). Kewajiban yang timbul dari sisi aktiva misalnya penyediaan dana bagi penarikan pinjaman yang disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman. Sedangkan kewajiban yang timbul dari sisi pasiva atau liabilities misalnya penyediaan dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah.

Sumber- sumber utama kebutuhan likuiditas dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum.
- 2) Menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada pada jumlah yang ditentukan.
- 3) Memenuhi penarikan dana baik oleh nasabah debitur maupun penabung.

b. Teori Manajemen Likuiditas

Menurut Veitzhal dalam Darma (2018) teori tentang manajemen likuiditas perbankan ini relatif hampir sama tuanya dengan ilmu perbankan. Ada empat teori likuiditas perbankan yang dikenal yaitu sebagai berikut:

1) *Commercial Loan theory*

Teori ini dianggap paling kuno, nama lain dari teori ini adalah real bills doctrine. Teori ini mulai dikenal sekitar 2 abad lalu. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The*

Wealth of Nation yang diterbitkan tahun 1776. teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). *Self Liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.

2) *Shiftability Theory*

Shiftability theory teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktiva ke pada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan, misalnya dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio aktiva. Jika dalam keadaan ini sejumlah depositors harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, bank hanya tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya.

3) *Anticipated Income Theory*

Sebagai teori yang dikenal tahun 1940 yang menonjol di Amerika Serikat, yaitu teori pendapatan yang diharapkan (*the anticipated income theory*) ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditunjukkan pada sector yang *feasible* dan layak akan menguntungkan bagi bank.

4) *The Liability Management Theory*

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah:

- a) Untuk menghadapi penarikan oleh nasabah
- b) Memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo
- c) Memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.

c. **Penilaian Likuiditas**

Likuiditas untuk memastikan dilaksanakan manajemen asset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kesukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid bila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Mamduh dan Halim) dalam Darma (2018).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap factor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

1) *Cash Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau deposit pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pasiva Likuid}} \times 100\%$$

2) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3) *Loan to Assets Ratio (LAR)*

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan bank dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. Loan to Assets Ratio dirumuskan dengan:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\%$$

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan akuntansi) ini, maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi.

a. Pengertian Laporan Keuangan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, berikut dikemukakan beberapa pengertian mengenai laporan keuangan antara lain:

- 1) Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (207 : 1) dalam Syafri (2012) :
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.
- 2) Menurut Soemarso dalam Syafri (2018), laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak

di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

- 3) Menurut Sundjaya dan Barlian dalam Syafri (2018), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan dipergunakan oleh pihak – pihak yang berhak yang pencatatannya selama periode akuntansi.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan cerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu. Selain digunakan sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 3) dalam Syafri (2018), laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- 2) Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Menurut Suwardjono dalam Syafri (2018), menyatakan tujuan penyampaian informasi keuangan mengenai unit organisasi perusahaan adalah :

- 1) Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditor untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit.
- 2) Menyediakan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomik (aset) perusahaan serta asal kekayaan tersebut (siapa pihak yang mempunyai hak atas aset tersebut).
- 3) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning power*).
- 4) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya.
- 5) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan (pendanaan) perusahaan.
- 6) Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memprediksi aliran kas perusahaan.
- 7) Menyediakan informasi lain yang membantu pemakai untuk menilai prestasi dan pertanggungjawaban keuangan manajemen.”

c. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 2), dalam Syafri (2018) “Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :

1) Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5) Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7) Masyarakat

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik.

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.”

d. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 1.2) dalam Syafri (2018) terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan.”

Jenis laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Neraca (*Balance Sheet*)

Menurut Soemarso dalam Syafri (2008), neraca adalah laporan keuangan yang dapat memberi informasi tentang sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk memperolehnya. Laporan ini menyajikan posisi keuangan perusahaan.

2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Menurut Marsuki dalam Syafri (2008), laporan laba rugi mencerminkan kemampuan atau kinerja manajemen dalam mengelola operasi usahanya menghasilkan surplus atau meminimalisasi defisitnya.

3) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Shareholder's Equity*)

Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. (Soemarso) dalam Syafri (2008). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 1.13) dalam Syafri (2018), “Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- a) Laba/ rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.”

4) Laporan Arus Kas (*Cashflow Statement*)

Agar seperangkat statemen keuangan menjadi lengkap, diperlukanlah informasi mengenai aliran kas suatu perusahaan yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama satu periode. Informasi ini dituangkan dalam statemen aliran kas (*statement of cashflow*). (Suwadjono) dalam Syafri (2018). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 22) dalam Syafri (2018), laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statement*)

Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 1.13) dalam Syafri (2018) menjelaskan bahwa, “Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan - pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.”

Menurut Hendriksen dalam Syafri (2018), pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal pasar modal secara efisien. Dalam interpretasi yang lebih luas, menurut Wolk dan Tearney dalam Keown (2018), dijelaskan bahwa, “Pengungkapan terkait dengan informasi baik yang terdapat dalam laporan

keuangan maupun komunikasi tambahan (*supplementary communication*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan di masa datang, prakiraan keuangan operasi, serta informasi lainnya”.

e. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau disusun untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan. Menurut Munawir dalam Syafri (2018), “Laporan keuangan bersifat historis atau menyeluruh. Sebagai suatu *progress report*, laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi :

1) Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)

Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

2) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*).

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*Generally Accepted Accounting Principles-GAAP*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.

3) Pendapat pribadi (*personal judgment*)

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.”

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan di atas, maka laporan keuangan itu memiliki beberapa keterbatasan antara lain :

- 1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam laporan ini terkandung pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai mungkin berbeda atau berubah.
- 3) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang terjual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan karena

naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga.

- 4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang.

Dengan memahami sifat dan keterbatasan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan, maka pengguna informasi dalam laporan keuangan dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat.

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Ramadaniar (2013).	Analisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang <i>Listing</i> di BEI Untuk Periode Tahun 2009 – 2011).	Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas	Deskriptif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 memiliki kinerja keuangan yang baik dilihat dari rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Oleh karena itu PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. dapat meningkatkan kesehatan keuangannya dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal.
2	Batubara (2010)	Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. Bumi Flora.	Likuiditas dan Profitabilitas	Deskriptif	Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio likuiditas perusahaan sudah baik, dimana dari rasio likuiditas sudah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

					memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat besar dan rasio profitabilitasnya juga diketahui sangat baik yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba.
3	Kartikasari, (2014)	Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Pada Bank Mandiri di BEL.	Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan analisis internal menunjukkan bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk ditinjau dari rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas cenderung mengalami peningkatan. Dari analisis eksternal juga dapat diketahui dari rasio Likuiditas terdapat pada <i>quick ratio</i> hasil rekapitalisasi tidak sehat, karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada rasio Profitabilitas dan Solvabilitas hasil dari rekapitalisasi cenderung sehat karena memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4	Wibisono (2012)	Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bank Muammalat Indonesia, Tbk Periode 2005 – 2009.	ROA dan ROE	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif dari nilai ROA dan ROE pada periode 2005-2008, sedangkan pada tahun 2009 ROA dan ROE mengalami penurunan yang cukup besar. Nilai KPMM turun pada 2005-2007 dan meningkat kembali pada tahun 2008-2009. Nilai KAP cenderung menurun dari tahun 2005 2009. Nilai NOM perusahaan mengalami tren meningkat pada tahun 2005- 2008 sedangkan pada tahun

					<p>2009 nilainya turun sampai 6.17%. Nilai STM stabil dari tahun 2005-2009 walaupun terjadi penurunan dan peningkatan tetapi nilainya tidak signifikan. Nilai MR memiliki penurunan yang signifikan pada periode 2006-2007 dan dilanjutkan penurunan periode 2008-2009 hingga ke level 5.81%. Kesimpulannya adalah kinerja keuangan PT. BMI dari komponen ROA dan ROE kurang maksimal, sedangkan dari analisis risiko peraturan BI kinerja keuangan cukup baik. Sehingga perlu pengelolaan yang lebih baik lagi dalam kemampuan menghasilkan laba dan memenuhi peraturan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Penulis 2021

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan uraian di atas, kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Rusiadi (2013:14), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		Desember 2020			Januari 2021			Februari 2021			Maret 2021		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■						
3	Seminar Proposal						■						
4	Perbaikan Acc Proposal							■					
5	Pengolahan Data								■				
6	Penyusunan Skripsi									■			
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■
8	Meja Hijau												■

Sumber : Diolah Penulis, 2021

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yaitu likuiditas.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
Likuiditas	Kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat, (Darma, 2008).	$\frac{\text{Total Kredit}}{100\% \text{ Dana Pihak Ketiga}} \times X$	Rasio

Sumber : Diolah Penulis, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua. Data tersebut berupa laporan keuangan yang di dapat dari BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua.

2. Sumber Data

Adapun sumber data tersebut diambil dari website masing – masing BPD yang diteliti berupa laporan keuangan BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua, periode data penelitian ini meliputi data tahun 2016 sampai tahun 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari website www.bi.go.id, BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI dan BPD Papua.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan rinci. Dalam penulisan data selalu diadakan analisis melalui reduksi, rangkuman, pemilihan pokok-pokok permasalahan yang penting,

menyusunnya secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah peneliti mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan, disamping itu reduksi data dapat pula membantu peneliti memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display data / sajian data

Membuat perbandingan-perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menemukan *general design* yang diperoleh dari sekumpulan data tebal, menyusunnya dalam kategori-kategori inti melalui penyeleksian data secara ketat. Dari data yang telah direduksi di atas disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Verifikasi data

Dalam proses verifikasi data selalu diupayakan mencari makna, mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dari setiap data yang diperoleh. Data dari lapangan kemudian disajikan melalui reduksi data maupun verifikasi yang bersifat sementara. Kemudian diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain dan dilakukan distorsi sehingga menghasilkan proposi-proposisi yang merupakan konsep-konsep sebagai embrio terbentuknya teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tentang Perusahaan

a. BPD Sulselbar

1) Sejarah Singkat BPD Sulselbar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam

Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

2) Visi dan Misi BPD Sulselbar

a) Visi Perusahaan

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama
Membangun Kawasan Timur Indonesia.

b) Misi Perusahaan

- (1) Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- (2) Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- (3) Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

b. BPD Sulut**1) Sejarah Singkat BPD Sulut**

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan

Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Sebagai perseroan terbatas maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akta No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, SH, notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I dengan Keputusan No. C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 4772. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100 milyar dengan kepemilikan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota pemegang saham Seri A maksimum sebesar 55 % dan pemegang saham seri B bersama-sama dengan pihak ketiga termasuk koperasi maksimum sebesar 45 %. Saham-saham terbagi atas Saham Seri A sebanyak 550.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saham Seri B sebanyak 450.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Perubahan bentuk badan hukum Bank Sulut tersebut merupakan tuntutan dalam rangkai memenuhi salah satu persyaratan mengikuti program rekapitalisasi perbankan karena Bank Sulut menghadapi risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM) kurang dari 8 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah

menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi. Tahun 2004 Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh saham negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual beli seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut tanggal 30 Juni 2004.

Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara, dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 milyar menjadi Rp. 300 milyar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24640/HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 23 Oktober 2006 No. 85 Tambahan No. 11432/2006.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulut).

2) Visi dan Misi BPD Sulut

a) Visi Perusahaan

Menjadi Bank Inovatif, Berdaya Saing Tinggi Dan Berorientasi Pada Kepuasan Nasabah.

b) Misi Perusahaan

(1) Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah Yang Berdikari dan Berkeadilan.

(2) Terus Berinovasi Menciptakan Model Bisnis, Layanan & Produk Yang Terbaik Serta Bernilai Tambah Kepada Nasabah.

(3) Menciptakan Human Capital Sebagai Pilar Penting Dalam Pencapaian Visi Perusahaan.

(4) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Konsisten.

c. BPD Sumut

1) Sejarah Singkat BPD Sumut

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Nopember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah .

Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum

Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya Bank swasta dan Bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam Bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang

mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya Bank swasta dan Bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam Bank yang direkapitalisasi.

PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi Bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarakan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah.

Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

2) Visi dan Misi BPD Sumut

a) Visi Perusahaan

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b) Misi Perusahaan

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

d. BPD Riau

1) Sejarah Singkat BPD Riau

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan Bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang

Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerBankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam

2) Visi dan Misi BPD Riau

a) Visi Perusahaan

Menjadi mitra syariah jasa layanan perBankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.

b) Misi Perusahaan

Secara teguh, utuh dan tumbuh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

e. BPD DKI

1) Sejarah Singkat BPD DKI

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub

dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

2) Visi dan Misi BPD DKI

a) Visi Perusahaan

Menjadi Bank Regional Modern & Bernilai tinggi, yang Menjaga Keseimbangan antara Keuntungan & Pembangunan Jakarta.

b) Misi Perusahaan

Mendukung pengembangan Jakarta dengan menjadi Bank pilihan untuk transaksi, UMKM dan mewujudkan masyarakat less-cash

f. BPD Papua

1) Sejarah Singkat BPD Papua

PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor : 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1

Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/ DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 4juta.

Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp. 50 milyar, Kemudian sesuai hasil Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hokum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp. 150 Milyar.

Perubahan menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2002, Akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-13031 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan berita Negara RI

Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002. Dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 tanggal, 22 Juni 2004 komposisi modal dasar Bank Papua dari Rp. 150 miliar menjadi Rp. 500 miliar, selanjutnya untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam hal Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (Capital Requirement) hingga tahun 2010, maka sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp. 1 Triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni,SH tanggal 8 Agustus 2008 No. 08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua yaitu perubahan dari Rp. 1 Triliun Menjadi Rp. 2 Triliun yang kemudian disahkan dalam SK Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 11/ SK/RUPS BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Papua sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH, M.Si tanggal 20 April

2010 No. 05, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30935.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Di tanggal 21 Agustus 2013, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor: 02/SK/RUPSLB/BPD/VIII/2013 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi Rp 4 triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Maryatie Simanjuntak, SH tanggal 21 Agustus 2013 No. 17 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 728.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 72.000 lembar saham dan disahkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor: 19 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013.

2) Visi dan Misi BPD Papua

a) Visi Perusahaan

Menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

b) Misi Perusahaan

(1) Memberikan pelayanan terbaik kepada stake holder.

(2) Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat.

2. Hasil Analisis Data *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Berikut ini adalah hasil analisis data LDR dalam menilai tingkat kesehatan pada perusahaan perBankan..

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Rasio LDR	Predikat
78% < LDR < 92%	Sehat
78% > LDR > 92%	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia 17/11/PBI/2015 (www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bobot penilaian tingkat kesehatan Bank untuk LDR.

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD Sulselbar Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD SULSEL- BAR	Giro	3.758.380	3.157.744	2.709.629	3.746.457	4.284.826
	Tabungan	2.421.833	2.645.858	3.586.567	4.587.307	4.636.149
	Deposito	4.835.350	5.362.694	6.352.647	7.300.209	7.264.841
	Jumlah DP III	11.015.563	11.166.296	12.648.843	15.633.973	16.185.816
	Kredit	11.369.745	13.352.644	15.230.189	17.573.397	18.635.757
	LDR (%)	103,22	119,58	120,41	112,41	115,14
	Predikat	tidak sehat				

Sumber : www.banksulselbar.co.id

Pada tabel 4.2 di atas diketahui bahwa Bank Sulselbar pada tahun 2016 LDR sebesar 103,22% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 119,58% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 120,41% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 112,41% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 115,14% sehingga dapat dikatakan tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank Sulselbar yang dinyatakan tidak sehat tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 120,41%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 103,22%.

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD Sulut Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD SULUT	Giro	1.562.990	1.736.058	1.618.196	1.255.482	1.428.990
	Tabungan	1.452.282	1.826.231	1.856.189	2.062.528	2.138.066
	Deposito	4.926.116	7.767.074	7.317.668	8.655.847	10.095.311
	Jumlah DP III	7.941.388	11.329.363	10.792.053	11.973.857	13.662.367
	Kredit	8.882.680	10.915.412	11.100.329	12.163.917	12.470.378
	LDR (%)	111,85	96,35	102,86	101,59	91,28
	Predikat	tidak sehat	tidak sehat	tidak sehat	tidak sehat	sehat

Sumber : www.bankSulut.co.id

Pada tabel 4.3 di atas diketahui bahwa Rasio LDR Bank Sulut pada tahun 2016 LDR sebesar 111,85% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 96,35% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 102,86% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 101,59% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 91,28% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank Sulut yang dinyatakan sehat tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 91,28%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 96,35%.

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD Sumut Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD SUMUT	Giro	6.172.707	5.680.952	4.839.885	4.864.212	4.427.331
	Tabungan	7.152.979	8.140.349	9.053.017	9.703.869	10.355.318
	Deposito	5.873.354	7.368.710	6.247.856	8.507.687	12.165.228
	Jumlah DP III	19.199.040	21.190.011	20.140.758	23.075.768	26.947.877
	Kredit	17.576.935	18.465.683	19.373.312	21.568.621	21.662.386
	LDR (%)	91,55	87,14	96,19	93,47	80,39
	Predikat	sehat	sehat	tidak sehat	tidak sehat	sehat

Sumber : www.banksumut.co.id

Pada tabel 4.4 di atas diketahui bahwa Bank Sumut pada tahun 2016 LDR sebesar 91,55% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 87,14% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 96,19% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 93,47% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 80,39% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank Sumut yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 91,55%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 93,47%.

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD Riau Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD RIAU	Giro	2.479.210	7.059.537	2.883.255	3.704.032	3.453.032
	Tabungan	4.050.095	3.907.701	5.518.607	6.052.374	6.052.385
	Deposito	4.509.294	5.290.408	8.562.392	10.180.645	12.337.227
	Jumlah DP III	11.038.599	16.257.646	16.964.254	19.937.051	22.142.644
	Kredit	14.095.301	12.325.548	16.632.633	17.884.069	18.960.949
	LDR (%)	127,69	75,81	98,04	89,70	85,63
	Predikat	tidak sehat	tidak sehat	tidak sehat	sehat	sehat

Sumber : www.bankriaukepri.co.id

Pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa Bank Riau pada tahun 2016 LDR sebesar 127,69% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 75,81% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 98,04% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 89,70% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 85,63% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank Riau yang dinyatakan sehat tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 89,70%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 98,04%.

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD DKI Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD DKI	Giro	9.079.577	13.213.374	10.932.203	7.611.715	11.177.236
	Tabungan	7.846.386	8.356.438	11.231.508	10.545.216	11.077.195
	Deposito	11.526.403	16.765.648	15.129.534	19.144.736	26.668.732
	Jumlah DP III	28.452.366	38.335.460	37.293.245	37.301.667	48.923.163
	Kredit	21.050.310	23.067.266	29.302.039	31.370.920	29.677.981
	LDR (%)	73,98	60,17	78,57	84,10	60,66
	Predikat	tidak sehat	tidak sehat	sehat	sehat	tidak sehat

Sumber : www.bankdki.co.id

Pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa Bank DKI pada tahun 2016 LDR sebesar 73,98% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 60,17% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 78,57% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 84,10% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 60,66% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank DKI yang dinyatakan tingkat kesehatannya tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 84,10%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 60,17%.

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel LDR Pada BPD Papua Periode 2016 – 2020

Nama Bank	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BPD PAPUA	Giro	7.033.795	7.641.693	8.151.733	11.086.817	9.241.367
	Tabungan	6.287.064	6.572.270	7.361.170	8.804.223	8.111.789
	Deposito	3.157.804	2.349.842	2.416.906	2.953.943	3.000.604
	Jumlah DP III	16.478.663	16.563.805	17.929.809	22.844.983	20.353.760
	Kredit	14.209.840	13.270.908	14.147.217	16.060.678	17.034.086
	LDR (%)	86,23	80,12	78,90	70,30	83,69
	Predikat	sehat	sehat	sehat	tidak sehat	sehat

Sumber : www.bi.go.id

Pada tabel 4.7 di atas diketahui bahwa Bank Papua pada tahun 2016 LDR sebesar 86,23% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 80,12% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 78,90% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 70,30% sehingga

dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 83,69% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank Papua yang dinyatakan sehat tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 86,23%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 70,30%.

D. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD Sulselbar Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.2 di atas diketahui bahwa BPD Sulselbar pada tahun 2016 LDR sebesar 103,22% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 119,58% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 120,41% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 112,41% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 115,14% sehingga dapat dikatakan tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD Sulselbar dinyatakan tidak sehat sepanjang periode penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020.

Rasio LDR diatas 92% (batas atas regulator) memperlihatkan bahwa Bank cukup ekspansif dalam penyaluran kredit. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan kredit yang diberikan setiap tahunnya.

Kredit Bank Sulselbar mengalami pertumbuhan sebesar 33,42% dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan kredit ini disokong oleh pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil.

Dari segi Dana Pihak ketiga Bank Sulselbar juga berhasil menumbuhkan penghimpunan dana sebesar 51,53% dibandingkan dengan tahun 2015. Sehingga secara menyeluruh walaupun LDR tahun 2016 berada pada angka 103,22% namun rasio LDR tersebut mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya sebesar 17,17%.

Kinerja Bank secara umum juga mengalami perbaikan yang terlihat dari membaiknya kinerja keuangan dan operasional Bank. Salah satu perbaikan terlihat dari peningkatan rating korporasi dan obligasi dari id A menjadi id A+ (berdasarkan penilaian kinerja Desember 2016). Kenaikan rating tersebut mencerminkan kemampuan Bank dalam meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Perbaikan ini sangat berdampak positif terhadap bisnis Bank salah satunya berupa peningkatan *corporate image* di mata nasabah yang pastinya berpengaruh terhadap keinginan nasabah untuk menggunakan produk – produk yang ditawarkan Bank.

Pada tahun 2017 Rasio LDR Bank Sulselbar berada pada angka 119,58% dan lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 103,22%. Hal ini disebabkan pertumbuhan kredit Bank sebesar 17,98% dari tahun sebelumnya jauh lebih besar dari pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang hanya sebesar 1,60% dari tahun sebelumnya.

Selain peningkatan pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil, pertumbuhan kredit pada tahun 2017 juga disebabkan oleh pengembangan *cluster* Desa Binaan melalui penyaluran Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR) kepada nelayan.

Pemberian Kredit PUR ini sejalan dengan visi program transformasi BPD untuk menjadikan Bank Daerah sebagai Bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja Bank pada tahun 2018 mengalami perbaikan dengan bertumbuhnya kredit yang diberikan sebesar 14,05% dari tahun sebelumnya dan penghimpunan dana yang naik 21,72% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana dinilai sangat baik jika dibandingkan pertumbuhan dana pada tahun 2017 yang hanya sebesar 1,60%. Pertumbuhan dana ini disebabkan adanya pelaksanaan langkah strategis berupa pengembangan produk diantaranya pelaksanaan undian berhadiah bagi para penabung, peningkatan layanan berupa *Mobile Banking* yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi keuangan melalui *smartphone* secara aman, mudah dan cepat.

Pada tahun 2019 Bank Sullelbar berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 15,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit ini salah satunya disebabkan bertumbuhnya kredit produktif yang meningkat sebesar 21,32%.

Untuk pertumbuhan dana, Bank Sulsebar berhasil mencatatkan pertumbuhan dana sebesar 17,23% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pengembangan produk dan peluncuran sejumlah produk baru dan layanan baru, khususnya produk dan layanan digital yang semakin melengkapi portofolio produk dan layanan Bank.

Pertumbuhan kredit dan dana Bank Sulsebar tahun 2019 ini masih mencatatkan rasio LDR sebesar 112,41%.

Tahun 2020 pertumbuhan kredit Bank Sulselbar hanya sebesar 5,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan dana hanya mencapai 3,52% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ini disebabkan adanya pandemi virus covid 19 yang melanda sejak bulan Maret 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam 5 tahun terakhir LDR Bank selalu berada diatas 100% bahkan berada diatas ketentuan OJK sebesar 92%. Namun, untuk memitigasi risiko likuiditas, Bank Sulselbar menerbitkan obligasi yang digunakan untuk menyokong pertumbuhan kredit Bank. Hal ini tentu dapat memitigasi risiko likuiditas yang dihadapi Bank. Namun bank tetap menghadapi risiko kepatuhan terhadap aturan/ regulasi yang ditetapkan oleh regulator.

2. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD Sulut Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.3 di atas diketahui bahwa BPD Sulut pada tahun 2016 LDR sebesar 111,85% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 96,35% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 102,86% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 101,59% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 91,28% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD Sulut dinyatakan tidak pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Tahun 2016 Bank Sulut mengalami pertumbuhan kredit sebesar 3,07 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit ini disokong oleh pertumbuhan kredit untuk segmen consumer, menengah dan korporasi. Terjadinya kenaikan segmen menengah dan korporasi dikarenakan mulai difokuskannya penyaluran kredit produktif dengan dibukanya jaringan kantor yang khusus melayani dan kredit usaha dan pusat layanan kredit usaha yang disebut Sentra Mitra Sejahtera (SMS). Selain itu faktor pendorong pertumbuhan kredit juga disebabkan penambahan tenaga *Account Officer* di unit kerja Cabang maupun Cabang Pembantu.

Untuk kredit konsumen, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh optimalnya Bank dalam memanfaatkan *captive market* Bank Sulut yakni fasilitas kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya terjadi peningkatan penghasilan pegawai ASN yang memicu terhadap kenaikan pengajuan kredit.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Bank Sulut juga mengalami pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tahun 2016 sebesar 8,17% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan *Annual Report* tahun 2016 disampaikan bahwa faktor – faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain adanya pengembangan organisasi yang difokuskan pada bidang – bidang pemasaran produk, Optimalisasi jumlah pegawai melalui perubahan formasi penempatan pegawai dari kondisi awal 30% berada pada *front liner* dan 70% berada pada *Backoffice* menjadi 60% berada pada *front liner* dan 40% berada pada *Backoffice*, menyusun program pengembangan kualitas karyawan melalui pelatihan dan pendidikan serta optimalisasi outlet yang kurang menunjang terhadap efektifitas bisnis bank.

Pada tahun 2017 Bank Sulut berhasil menurunkan rasio LDR dari tahun sebelumnya sebesar 111,85% menjadi 96,35%. Secara umum penurunan rasio ini menunjukkan perbaikan kinerja Bank dalam hal pengelolaan dana maupun kredit Bank. Namun, rasio tersebut masih berada diatas ambang batas atas rasio LDR yang ditetapkan oleh regulator.

Pertumbuhan kredit Bank pada tahun 2017 sebesar 22,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum kredit masih didominasi oleh kredit konsumtif. Namun, untuk tahun 2017 ini kredit investasi dan modal kerja mulai menunjukkan kinerja positif dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 276,20% untuk kredit investasi dan 477,95% untuk kredit modal kerja.

Untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga, Bank Sulutgo berhasil mencatatkan pertumbuhan dana yang signifikan, dimana pada tahun 2017 Bank berhasil menumbuhkan dana sebesar 42,66% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disebabkan adanya pengembangan produk maupun layanan yang dilakukan oleh Bank Sulut. Pengembangan produk ini searah dengan harapan dari para nasabah diantaranya berupa penambahan fitur maupun variasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu pertumbuhan juga disebabkan dengan peningkatan kegiatan pemasaran yang dilakukan Bank melalui tenaga pemasar Bank maupun *word of mouth* sesuai dengan hasil survey nasabah.

Pada tahun 2018 rasio LDR Bank Sulut kembali mengalami kenaikan sebesar 102,86% dari tahun sebelumnya sebesar 96,35%. Kenaikan rasio ini disebabkan oleh penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar -4,76%.

Penurunan Dana Pihak Ketiga ini disebabkan antara lain adanya penurunan jumlah Giro dan Deposito masing – masing sebesar -6,79 dan -5,81% dari tahun sebelumnya.

Faktor yang menyebabkan penurunan Giro disebabkan adanya perpindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow ke Bank lain yang juga diikuti oleh perpindahan gaji ASN di Kabupaten tersebut. sementara itu, penurunan deposito disebabkan adanya kenaikan suku bunga LPS tahun 2018 dari 5,75% menjadi 6,75% yang menyebabkan terjadinya perang suku bunga di pasar perbankan. Selain itu pada awal tahun 2018 Bank Sulut juga telah berhasil menghimpun dana deposito sebesar Rp. 10 triliun sehingga Bank mengalami over likuid sehingga Bank mengambil kebijakan penurunan dana deposito.

Pertumbuhan kredit Bank Sulut tahun 2018 tercatat sebesar 1,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi kredit yang diberikan masih didominasi oleh pemberian kredit konsumtif. Pertumbuhan kredit konsumtif ini disebabkan pengembangan produk khususnya pengembangan kredit pensiun dan kredit KPR FLPP. Selain itu Bank juga mengadakan promosi – promosi produk berupa *member get member* yang dilakukan oleh debitur PNS maupun Pensiunan.

Tahun 2019 Bank Sulut mengalami pertumbuhan kredit sebesar 9,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kredit tahun 2019 juga masih didominasi oleh pertumbuhan kredit konsumtif diantaranya adalah penyaluran kredit kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun (Kredit PRA-Pensiun) dan pemberian kredit konsumtif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota yang dilantik pada tahun 2019.

Untuk kinerja penghimpunan dana, Bank Sulut berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 10,97% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana ini disebabkan adanya promosi berupa pemberian hadiah langsung pada saat pembukaan rekening kepada nasabah, melakukan promosi berupa kegiatan *Gathering*, penetrasi produk kepada komunitas – komunitas (otomotif, fotografer, dll) dengan penerbitan ATM dengan logo komunitas tersebut.

3. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD Sumut Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.4 di atas diketahui bahwa BPD Sumut pada tahun 2016 LDR sebesar 91,55% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 87,14% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 96,19% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 93,47% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 80,39% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD Sumut dinyatakan tidak sehat pada tahun 2018 sebesar 96,19% dan tahun 2019 sebesar 93,47%.

Rasio LDR Bank Sumut tahun 2018 sebesar 96,19%. Pada tahun 2018 Bank mengalami pertumbuhan kredit sebesar 5,42% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit ini didominasi oleh pertumbuhan kredit konsumtif berupa kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada Pensiunan ASN dan juga Kredit Pemilikan Rumah (Umum /FLPP).

Sedangkan Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar -4,02. Penurunan dana disebabkan adanya penurunan Giro dan Deposito. Penurunan Giro lebih disebabkan realisasi belanja daerah ataupun penyerapan anggaran daerah. Sedangkan penurunan Deposito disebabkan oleh adanya perpanjangan perjanjian *refinancing* KPR sampai dengan 22 Desember 2018, dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7%, sehingga Bank lebih memilih untuk melepas dana – dana mahal yang dikelola.

Rasio LDR Bank Sumut tahun 2019 sebesar 93,47%, atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami perbaikan, rasio LDR Bank Sumut tahun 2019 masih berada 1,47% diatas ambang batas Rasio LDR yang ditetapkan oleh regulator. Perbaikan rasio LDR ini juga menunjukkan Bank lebih efektif dalam mengelola sumber dana dan penyaluran dana.

Penyaluran kredit mengalami pertumbuhan sebesar 9,44% dari tahun sebelumnya dan masih didominasi oleh pertumbuhan kredit konsumen diantaranya dengan adanya kredit yang ditujukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilantik tahun 2019.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pada tahun 2019 juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,74% yang didominasi oleh pertumbuhan deposito yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dana sebesar 36,22%. Selain itu kenaikan dana juga disebabkan bertambahnya jumlah saldo tabungan yang berasal dari nasabah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang sebelumnya pembayaran gaji dilakukan secara manual telah dilakukan melalui rekening tabungan.

4. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD Riau Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa Bank Riau pada tahun 2016 LDR sebesar 127,69% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 75,81% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 98,04% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 89,70% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 85,63% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD Riau dinyatakan tidak sehat pada tahun 2016 sebesar 127,69%, 2017 sebesar 75,81% dan 2018 sebesar 98,04% dan Rasio LDR Bank Riau yang dinyatakan sehat tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 89,70%, sedangkan Rasio LDR Bank dinyatakan tidak sehat terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 98,04%.

Pertumbuhan kredit di tahun 2016 tercatat sebesar 2,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit masih didominasi oleh kredit konsumen kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk produk kredit lainnya yang dimiliki Bank Riau umumnya mengalami penurunan baki debit yang disebabkan beberapa hal diantaranya pada sektor kredit mikro dan kecil terdapat produk yang tidak disalurkan lagi dan mengalami perlambatan dikarenakan adanya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki tingkat bunga rendah.

Untuk performance penghimpunan dana tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -7,99% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan dana disebabkan adanya penurunan saldo giro yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah yang menahan pencairan dana perimbangan triwulan IV pada akhir

tahun 2016. Penurunan juga terjadi pada saldo tabungan yang berdasarkan *Annual Report* Bank Riau disampaikan penyebabnya antara lain kurangnya promosi produk dan pengembangan fitur – fitur tabungan yang belum maksimal.

Rasio LDR Bank Riau tahun 2017 mengalami perbaikan dengan rasio 75,81% meskipun masih belum memenuhi batas atas yang ditetapkan oleh regulator.

Perbaikan rasio ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Bank pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Bank berhasil meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar 31,73%. Pertumbuhan dana disebabkan antara lain adanya pengembangan produk simpanan, pemberian hadiah langung, pengembangan layanan prioritas, menjalin kerjasama dengan asosiasi/ komunitas tertentu untuk *co-branding* ATM/ Tabungan. Selain itu, penghimpunan dana berupa giro juga mengalami peningkatan yang signifikan berupa peningkatan dana Pemerintah Daerah yang berasal dari kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Riau dan Kepulauan Riau untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dan Aplikasi *online* SP2D (Surat Peintah Pencairan Dana) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kas daerah. Selanjutnya Bank Riau juga menjalin kerjasama untuk penerimaan pembayaran pajak daerah secara *online* seperti PBB, BPHTB, Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Parkir dalam rangka peningkatan pajak daerah.

Untuk penyaluran kredit, tahun 2017 Bank Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,06% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit ini bersumber dari meningkatnya pertumbuhan kredit ke sektor perdagangan, pertanian dan jasa sosial.

Rasio LDR Bank Riau tahun 2018 mengalami perbaikan dari tahun 2017 dengan rasio 98,04%. Pertumbuhan penghimpunan dana pada tahun 2018 tidak signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang mengakibatkan rasio LDR menjadi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Riau tahun 2018 tercatat sebesar 2,69% dan pertumbuhan kredit sebesar 6,99%. Dari komposisi kredit yang diberikan, kredit masih didominasi oleh segmen konsumtif. Sedangkan pertumbuhan kredit terbesar di tahun 2018 terjadi pada segmen investasi dengan pertumbuhan 162,11% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Riau tahun 2020 tercatat sebesar 11,06%. Sedangkan pertumbuhan kredit tahun 2020 sebesar 3,38% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan Kredit Sindikasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, pertumbuhan kredit di tahun 2020 ini tidak dapat dipacu lebih dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang melanda sejak Maret 2020.

Pertumbuhan dana dan kredit dipengaruhi oleh rencana Bank Riau melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2021. Rencana konversi ini memiliki peluang untuk tumbuh positif di Daerah Riau ataupun Kepulauan Riau antara lain :

- a. Potensi perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang positif di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;
- b. Profil penduduk muslim yang besar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;

- c. Peluang perkembangan ekosistem industry halal, dengan mencanangkan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai halal *destination* dan pusat halal *tourism*.
- d. Pemanfaatan daerah dan aktifitas pariwisata di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau memungkinkan bagi Bank untuk mengembangkan transaksi *money changer* dan *remittance*.
- e. Ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah Bank syariah sangat tinggi.

5. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD DKI Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa BPD DKI pada tahun 2016 LDR sebesar 73,98% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 60,17% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 78,57% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 84,10% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 60,66% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD DKI yang dinyatakan tidak sehat pada tahun 2016, 2017 dan 2020.

Kredit Bank DKI Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -3,19% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan kredit ini lebih kepada kebijakan manajemen untuk lebih selektif di tahun 2016 karena berfokus pada perbaikan kualitas aset, penataan proses bisnis serta meningkatkan mitigasi risiko.

Pada tahun 2016 penghimpunan dana Bank DKI mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga disebabkan oleh pertumbuhan saldo tabungan dan juga deposito. Untuk pertumbuhan tabungan Bank DKI disebabkan antara lain adanya kerjasama antara Bank dengan Instansi untuk program *autodebet* dan penggunaan *Cash Managemet System* sebagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran iuran bulanan.

Pada tahun 2017 kredit Bank DKI mengalami pertumbuhan sebesar 9,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disebabkan adanya perbaikan proses kredit untuk memastikan penyaluran kredit baru dilakukan secara *prudent*. Beberapa yang dilakukan antara lain adalah penyempurnaan SOP, penataan kewenangan pemutus kredit. Perbaikan proses kredit yang telah dilakukan memberikan keyakinan bagi Bank untuk terus mengakselerasi pertumbuhan kredit pada tahun mendatang. Selain itu, Bank juga masih berfokus pada upaya perbaikan kualitas kredit.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank DKI pada tahun 2017 meningkat signifikan dengan pertumbuhan mencapai angka 34,7%. Peningkatan DPK ini didukung dengan adanya sinergi dalam layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi DKI dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank DKI pada tahun 2020 meningkat signifikan dengan pertumbuhan mencapai angka 31,15%. Peningkatan ini disebabkan adanya koordinasi Bank dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, selanjutnya, Bank juga melakukan pendekatan secara intensif dengan BUMD untuk menempatkan dananya pada Bank DKI.

Tahun 2020 perkembangan kredit Bank DKI turun sebesar -4,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ini disebabkan adanya pandemi virus covid 19 yang melanda sejak bulan Maret 2020.

6. Pembahasan Hasil LDR Pada BPD Papua Periode 2016 – 2020

Hasil penelitian pada tabel 4.7 di atas diketahui bahwa BPD Papua pada tahun 2016 LDR sebesar 86,23% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2017 LDR sebesar 80,12% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2018 LDR sebesar 78,90% sehingga dapat dinyatakan sehat. Pada tahun 2019 LDR sebesar 70,30% sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. Pada tahun 2020 LDR sebesar 83,69% sehingga dapat dinyatakan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD Papua yang dinyatakan tidak sehat pada tahun 2019 dengan rasio LDR sebesar 70,30%.

Pada tahun 2019 Bank Papua mengalami pertumbuhan dana sebesar 27,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh Giro sebesar 36,01%. Pertumbuhan dana giro ini disokong oleh meningkatnya dana Dinas baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk pertumbuhan kredit, Bank Papua mengalami pertumbuhan sebesar 13,53% di tahun 2019. Pertumbuhan kredit ini disokong oleh adanya penambahan jaringan Kantor yang berada di sentra – sentra ekonomi sehingga dapat menyalurkan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku UMKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Rasio LDR Bank BPD Sulselbar dinyatakan tidak sehat sepanjang periode penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020. Rasio LDR Bank tahun 2016 sampai dengan 2020 berada diluar batas yang ditetapkan oleh regulator. Namun Rasio LDR ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen untuk tetap melakukan ekspansi kredit dengan memitigasi risiko yang timbul dari Rasio LDR ini. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan oligasi.
2. Bahwa Rasio LDR Bank BPD Sulut dinyatakan tidak pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Bank melakukan banyak upaya perbaikan khususnya terhadap produk – produk simpanan guna mengimbangi pertumbuhan kredit. Pada tahun 2017 Rasio LDR sempat mengalami perbaikan bersamaan dengan adanya perbaikan – perbaikan yang dilakukan. Namun Rasio LDR kembali meningkat di tahun 2018 disebabkan adanya pemindahan dana salah satu Pemerintah Daerah ke Bank lain.
3. Rasio LDR Bank BPD Sumut dinyatakan tidak sehat pada tahun 2018 sebesar 96,19% dan tahun 2019 sebesar 93,47%. Hal ini disebabkan Bank memutuskan untuk melepas dana dengan bunga tinggi seperti deposito

korporasi dan menghimpun sumber dana dari pelaksanaan *refinancing* KPR dengan pihak ketiga yang dinilai memberikan bunga yang lebih menguntungkan Bank. Pada tahun 2019 Bank berhasil memperbaiki rasio LDR yang disebabkan adanya peningkatan penghimpunan dana berupa pembayaran gaji Pegawai melalui rekening tabungan yang merupakan bagian kerjasama dari Bank dengan Pemerintah Daerah.

4. Rasio LDR Bank BPD Riau dinyatakan tidak sehat pada tahun 2016 sebesar 127,69%, 2017 sebesar 75,81% dan 2018 sebesar 98,04%. Salah penyebab tingginya Rasio LDR pada tahun 2016 disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah yang menahan pencairan dana perimbangan triwulan IV pada akhir tahun 2016 sehingga sumber dana yang dimiliki Bank berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Bank berhasil menjalankan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dan Aplikasi *online* SP2D (Surat Peintah Pencairan Dana) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kas daerah. Sedangkan tahun 2018 terjadi pertumbuhan dana yang sangat baik, selain adanya perbaikan – perbaikan produk, hal ini juga disebabkan rencana Bank untuk melakukan konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.
5. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio LDR Bank BPD DKI yang dinyatakan tidak sehat pada tahun 2016 sebesar 73,98%, 2017 sebesar 60,17% dan 2020 sebesar 60,66%. Rasio LDR yang berada dibawah batas bawah yang ditetapkan regulator ini lebih

disebabkan kebijakan manajemen Bank yang lebih berfokus pada perbaikan kualitas kredit dan pemberian kredit diberikan lebih selektif. Selain itu Bank juga melakukan perbaikan dan pengembangan produk penghimpun dana.

6. Rasio LDR Bank BPD Papua yang dinyatakan tidak sehat pada tahun 2019 dengan rasio LDR sebesar 70,30%. Rendahnya angka rasio (dibawah ketentuan regulator) disebabkan tingginya dana Pemerintah Daerah yang masih berada di rekening giro yang merupakan dana belanja daerah yang belum sepenuhnya terserap/ dibelanjakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian, maka saran untuk Bank BUMD adalah sebagai berikut:

1. Bank Sulselbar kiranya dapat melakukan terobosan berupa perbaikan ataupun pengembangan produk penghimpun dananya sehingga dapat menghimpun dana masyarakat lebih baik sehingga Bank memiliki sumber dana yang lebih murah dan pastinya akan meningkatkan keuntungan Bank.
2. Bank Sulut kiranya dapat melakukan kerjasama berupa pengelolaan kas daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk dana yang masih belum dikelola secara *on-line* misalnya pengelolaan pajak daerah, dsb. Sumber penelolan dana ini merupakan sumber dana murah dan cukup besar.

3. Bank Sumut kiranya dapat mengembangkan produk penghimpun dana khususnya giro dan tabungan sehingga sumber pendanaan yang dimiliki Bank tidak tergantung dari deposito yang pastinya memiliki biaya yang lebih besar.
4. Bank Riau kiranya dapat mengembangkan produk dana dan kredit yang lebih kompetitif. Hal ini berkaitan dengan rencana konversi Bank Riau yang pastinya memiliki kendala tersendiri khususnya penyaluran kredit/ pembiayaan yang nantinya akan lebih terbatas khususnya tujuan kredit maupun sektor usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.
5. Bank DKI kiranya melakukan perbaikan terhadap produk kredit baik dari segi Prosedur Pemberian (SOP) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (Pemasar Kredit, Analis kredit, dl) berdasarkan kondisi yang ditemukan Bank pada saat fokus melakukan perbaikan kualitas kredit. Dengan melakukan perbaikan produk diharapkan kedepannya kredit yang diberikan menjadi lebih meningkat dengan kualitas kredit yang baik.
6. Bank Papua kiranya melakukan penambahan unit – unit kantor di daerah yang berpotensi terhadap penyaluran kredit khususnya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini terlihat dari keberhasilan Bank menumbuhkan kredit sampai dengan 13,53% di tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal, 2015. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Edisi Revisi. UMM Press. Malang.
- Batubara, Abdul Hasyim, (2010). *Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. Bumi Flora*. ISSN : 1979 – 5408. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu.
- Darma. Hetna, (2018). *Analisis Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Samarinda*.
- Dendawijaya, Lukman, 2014. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Damayanti, F., Garvita, R. V., Wawangningrum, H., & Rahayu, S. (2021). *Flower development, pollen viability and pollen storage test of Aeschynanthus radicans*. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(4).
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabet.
- Hariyani, Iswi, 2016. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Cetakan Pertama. PT. Alex Media Utama Komputindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (207). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Irawan (2018). *Financial Statement Analysis*. Tinjauan Research dan Penilaian Bisnis. Smartprint Publisher: Medan.
- Ismail, 2015. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Kencana. Jakarta.
- Kartikasri, Meidita, (2014). *Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Pada Bank Mandiri di BEI*. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 3 No. 11.
- Kasmir, (2011). Edisi Revisi 2008,. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keown, J. Arthur., John D. Martin., J. William Petty., David F. Scott, Jr. (2018). *Manajemen Keuangan : Prinsip dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Indeks.
- Lubis, Irsyad. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. USU Press. Medan.
- Mustangimah, M., Putera, P. B., Zulhamdani, M., Handoyo, S., & Rahayu, S. (2021). *Evaluation of the Indonesia national strategic policy of science and technology development*. *Journal of Science and Technology Policy Management*.

- Puspitasari, Diana, 2009. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI Terhadap ROA (Studi Pada Bank Devisa Di Indonesia Periode 2003-2007)*. Unpublished Tesis S2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ulfiana, E., Wahyuni, S., & Rahayu, S. (2020). *The effect of postpartum coping skill classes (PCSC) on stress level, cortisol levels, maternal self-efficacy, and baby's growth and development In Semarang, Central Java*. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 20(1), 122-129.
- Ramadaniar, Buyung, (2013). *Analisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang Listing di BEI Untuk Periode Tahun 2009 – 2011)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.1 No. 1 April 2013. Administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.
- Rusiadi et al. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.
- Rahayu, S., & Satria, C. (2019). *The Effect of Supply Chain Strategy and Marketing Mixes on Purchase Decisions Sharia Productin Palembang Region*. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(3), 389-395.
- Sawir, Agnes, 2015. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Cetakan Kelima. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soemarso, 2013. *Akuntansi Suatu Pengantar*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syafri, Sofyan, (2012). *Teori Akuntansi : Laporan Keuangan*, Edisi 1, Cetakan 3, Bumi Aksara, Jakarta.
- Warsono, 2013. *Manajemen Keuangan Jilid I*, Edisi 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Wibisono, Andri, (2012). *Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2005 – 2009*. *Jurnal Administrasi Bisnis Volume 1 Nomor 1 September 2012*.